

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2017 -2018 SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KET	
				ALASAN (5)	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	Dokumen	Hasil dokumen perencanaan yang berkualitas dan ditindaklanjuti tersebut berupa Draft perwako, atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.	jumlah rekomendasi/dokumen hasil perencanaan pemerintah yang ditindaklanjuti/disepakati untuk dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	<p>dokumen kajian dan OPD pengguna dokumen perencanaan</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan Penyusunan RKPD Kegiatan Review RPI2JM Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PUG Kegiatan Pemantau dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)</p>	(9)
2	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang	%	Aspirasi merupakan salah satu syarat yang dipenuhi oleh Bappeda sebagai lembaga perencanaan. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang harus mencerminkan aspirasi masyarakat (Permendagri 54/2010)	Persentase jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dibanding total belanja langsung APBD	<p>Musrenbang RKP</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP</p>	
3	Terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan yang responsif	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKP	%	Harus ada sinkronisasi usulan musrenbang dengan RKP dan dokumen perencanaan lainnya	Persentase jumlah program program yang ditetapkan dalam RKP dibanding dengan jumlah total program program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya	<p>Dokumen RPJMD, Dokumen Renstra, Dokumen Renja, Dokumen KUA PPA</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Kegiatan Musrenbang RKP Kegiatan Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan Kegiatan Penyusunan KUA Kegiatan Penyusunan PPA Kegiatan Penyusunan KUA PPA Perubahan</p>	

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
				ALASAN	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah	rapat koordinasi	Hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan berupa hasil rapat koordinasi renja OPD dan Renstra OPD dan perencanaan bidang ekonomi, sosbud dan tata ruang yang ditindaklanjuti	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan jumlah hasil rapat koordinasi yang di sepakati	Forum pembahasan Renja OPD, Fasilitas Peny. Renstra OPD, koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan Sosbud, koordinasi Rencana Tata Ruang	(8) Program Perencanaan Pembangunan Kegiatan Forum Gabungan SKPD Kegiatan Fasilitas Penyusunan Renstra SKPD Program Perencanaan Bidang Ekonomi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosbud Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang Kegiatan Peninjauan Kembali RTRW	(9)
5	Terwujudnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	Jumlah laporan yang di tindaklanjuti tersebut dapat berupa laporan Evaluasi RKPD, laporan Evaluasi RPJMD, Laporan Evaluasi Dana dari Pusat	Jumlah laporan evaluasi yang ditindaklanjuti/disepakati untuk di laksanakan dengan jumlah laporan evaluasi yang di keluarkan	Laporan Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD, Evaluasi Dana dari Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kegiatan dana DAK, TPUB Kegiatan Evaluasi RPJMD 2013-2018 Kegiatan Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKPD	

No	SASARAN (2)	INDIKATOR (3)	SATUAN (4)	PENJELASAN		PROGRAM DAN KEGIATAN (8)	KET (9)
				ALASAN (5)	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN (6)		
6	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perumusan kebijakan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan dalam perumusan kebijakan	%	Hasil kajian kelibangan yang di manfaatkan/digunakan untuk perumusan kebijakan daerah kajian tersebut dapat berupa naskah akademik atau pelaksanaan rekomendasi hasil kajian kelibangan.	Hasil kajian kelibangan yang di manfaatkan/digunakan untuk perumusan kebijakan daerah dengan seluruh kajian kelibangan yang dikeluarkan	<p>(8)</p> <p>Program Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Kegiatan Diskusi Aktual Daerah</p> <p>Kegiatan Penelitian dan kajian Sosial budaya</p> <p>Kegiatan Penelitian dan kajian ekonomi infrastruktur</p> <p>Kegiatan Forum Dewan Riset Daerah</p> <p>Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan</p>	
7	Tersedianya data dan statistik yang akurat dan up to date untuk perencanaan pembangunan	Tingkat integrasi data OPD dalam Padang Panjang satu data	%	Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU No. 25 tahun 2014). Ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan	Jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan datanya dalam Padang Panjang Satu Data di bandingkan dengan jumlah OPD	<p>Program Pengembangan Data dan Informasi</p> <p>Kegiatan Sistem Informasi pembangunan daerah</p> <p>Kegiatan daerah dalam angka</p>	

